

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2022. LKj-IP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021– 2026 Kota Dumai. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam rangka mewujudkan good governance. Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi antara lain sebagai :

1. Media hubungan kerja organisasi;
2. Media akuntabilitas;
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan
4. Instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.

Selain beberapa fungsi tersebut, LKjIP juga disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai tahun 2022 dalam memberikan layanan kepada masyarakat, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan

di tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Dumai, Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI



Drs. H. KHAIL ADLI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700511 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
B. ISU STRATEGIS	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	8
B. REALISASI ANGGARAN	17
C. PRESTASI/PENGHARGAAN	32
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN :	
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Rencana Kinerja Tahun 2022	
Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja 2022	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diwajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah mengatur bahwa semua instansi pemerintah diamanatkan untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai telah menyusun sebuah laporan. guna mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). baik keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RKT dan sejalan dengan Renstra selama kurun waktu 1

(satu) tahun. Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan rangkaian program dan kegiatan tersebut beserta capaiannya bertujuan untuk :

1. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas sekaligus peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai sendiri;
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas yang diemban dan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekaligus sebagai sarana evaluasi bagi setiap program dan kegiatan-kegiatan Dinas;
3. Menciptakan self-assessment (penilaian diri) yang diharapkan akan memberikan koreksi, perbaikan dan dorongan (feed back) untuk kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya yang telah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Dumai;

2. Menjadikan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, untuk kemudian diharapkan dapat memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai di masa yang akan datang.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

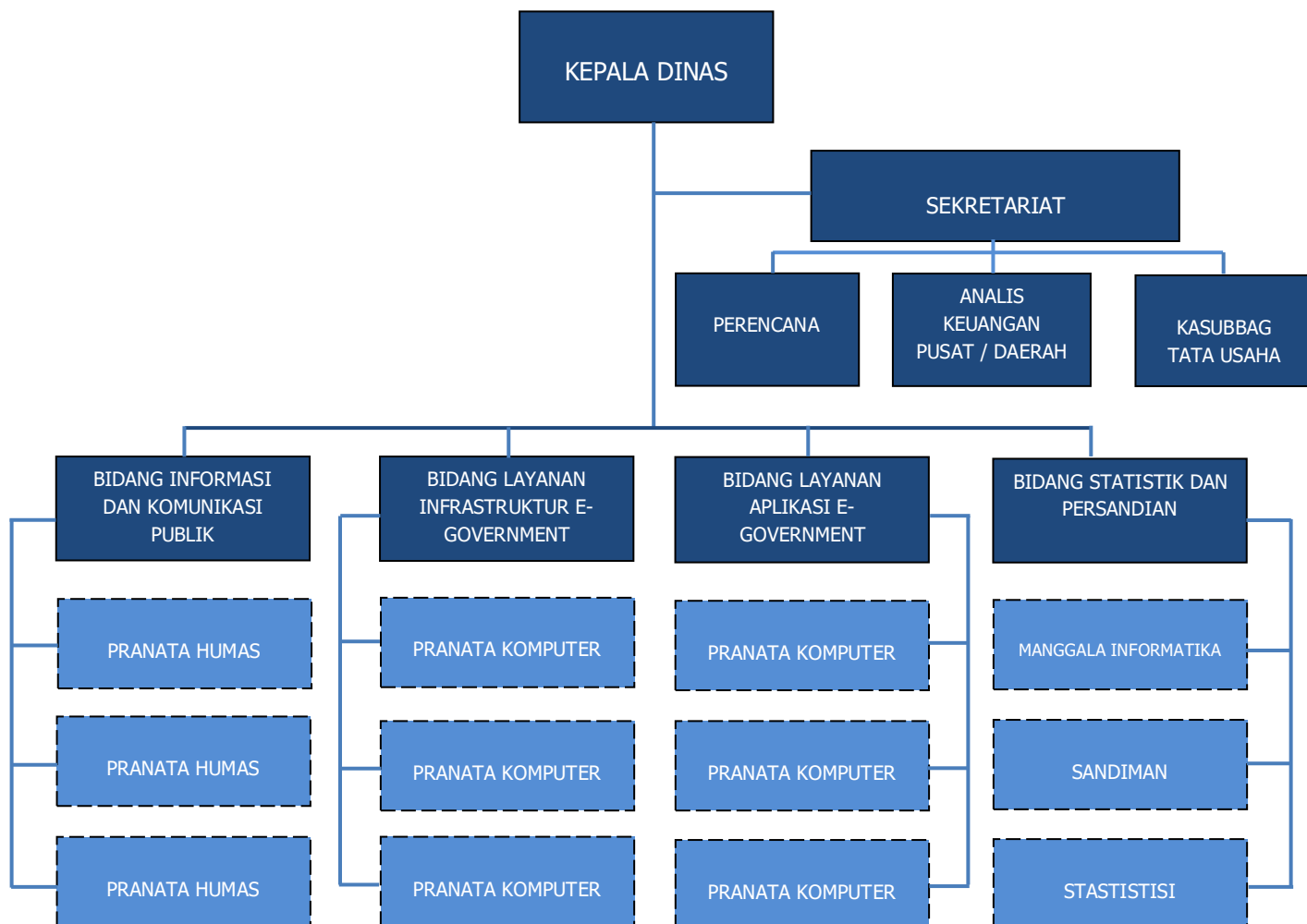
- a. Perumusan kebijaksanaan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Adapun susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Perencana; dan
 - 3. Analis Keuangan Pusat / Daerah;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - Pranata Humas;
 - Pranata Humas;
 - Pranata Humas;
- d. Bidang Layanan Infrastruktur E-Government, terdiri dari:
 - Pranata Komputer;
 - Pranata Komputer;
 - Pranata Komputer;
- e. Bidang Layanan Aplikasi E-Government, terdiri dari:
 - Pranata Komputer;
 - Pranata Komputer;
 - Pranata Komputer;
- f. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari;
 - Manggala Informatika;
 - Sandiman;
 - Statistisi;
- g. Kelompok Jabatan Struktural.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Dumai



Sampai dengan Desember 2022, jumlah PNS di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai sebanyak 30 orang. Dari total 30 PNS tersebut, berdasarkan golongan terbanyak adalah PNS golongan III sebanyak 22 orang atau sebesar 73.33%, disusul dengan PNS golongan II sebanyak 3 orang atau sebesar 10%, Disusul dengan PNS golongan I sebanyak 1 orang atau sebesar 3.33%. Sedangkan jumlah PNS golongan IV sebanyak 4 orang atau sebesar 13.33%.

B. ISU STRATEGIS

Isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah suatu kondisi aktual, yang merupakan sesuatu hal yang menjadi target perubahan yang akan dicapai.

Dalam Pelayanan Komunikasi dan Informatika sebagai Tupoksi Dinas saat ini telah memasuki era reformasi. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan informasi, khususnya yang menyangkut program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kepala Daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksananya pengembangan pembangunan e- Government. Tantangan utama **“pengembangan e-Government”** adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Infrastruktur komunikasi data dan informasi infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi, permasalahan itu antara lain:

1. Perlunya peningkatan optimalisasi penerapan kebijakan internal, tata kelola dan layanan SPBE;
2. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan, pemanfaatan media komunikasi publik;
3. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai;
4. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah;
5. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
6. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Dumai Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Indeks layanan SPBE	Indeks	2,83
		Akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	Akses	90
		Persentase	Persen	85

		Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui Media		
--	--	--	--	--

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai mempunyai 1 (Satu) sasaran strategis yang merupakan tujuan utama dengan masing-masing memiliki target capaian, Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai harus mampu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan utama yang telah direncanakan dan disusun pada Tahun 2022 dengan berbagai macam inovasi dan terobosan-terobosan baru yang mendukung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung baik dari sisi infrastruktur maupun sisi koordinasi yang mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan utama.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Dokumen Perjanjian Kinerja Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai Tahun 2022 tersaji dalam Lampiran-1.

Lampiran Perjanjian Kinerja 2022 :



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. KHAIRIL ADLI, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM. MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2022


Pihak Kedua
WALIKOTA
H. PAISAL, SKM. MARS


Pihak Pertama
KEPALA
Drs. KHAIRIL ADLI, M.Si
NIP. 19700511 199101 1 001

Lampiran : Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1 Indeks layanan SPBE	Indeks	2,83
2		Akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	Akses	90
3		Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media	Persen	85

Sasaran	:	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1.758.144.752,00
			1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.758.144.752,00
			2.	Program Aplikasi Informatika	Rp.	3.157.112.260,00
			2.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.314.400.946,00
			2.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	842.711.314,00
			3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp.	111.448.000,00
			3.1	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	111.448.000,00
			4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.	127.099.368,00
			4.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	127.099.368,00

Jumlah Rp. 5.153.804.380,00

Dumai, Januari 2022



Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp, 11.632.386.261,- yang digunakan untuk melaksanakan 5 program sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Dumai Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.406.312.480
2	Informasi dan Komunikasi Publik	2.434.944.752
3	Aplikasi Informatika	3.510.551.661
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	132.478.000
5	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	139.099.368

Dari total Rp. 11.623.386.261,- anggaran untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai telah terealisasi Rp. 11.314.885.363 atau dengan persentase capaian sebesar 97,35%. Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai terdiri dari anggaran Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 5.406.312.480 (46,51%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.187.204.051 atau 95,94% dan anggaran Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp. 2.434.944.752 (20,94%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.430.160.983 atau 99,80% dan anggaran Aplikasi Informatika sebesar Rp. 3.510.551.661 (30,20%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.430.660.119 atau 97,72% dan anggaran Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar Rp. 132.478.000 (1,13%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 130.483.500 atau 98,49% dan terakhir anggaran Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp. 139.099.368 (1,19%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 136.376.710 atau 98,04%.

Dari 5 program ini, semua persentase penyerapannya diatas 90% hal ini dapat dikategorikan sudah optimalnya penyerapan anggaran pada 5 program tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam penjabaran akuntabilitas, perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap komponen-komponen penting yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan maupun hambatan yang dialami selama suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai.

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perwujudan akuntabilitas kinerja, LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2022 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai.

Untuk mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada Tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk

mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (performance gap), yang selanjutnya berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pencapaian indikator sasaran tahun 2022 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 -2026, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Pencapaian Indikator sasaran tahun 2022 yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI S/D SEMESTER 1 TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,83	2,63	92,93
Akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	Akses	90	111	123
Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang di Sampaikan Melalui Media	Persen	85	85	100

Capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran diatas karena didukung dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

1. Kategori e-government Kota Dumai

Target dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah memperoleh nilai indeks e-government sebesar 2,83 dengan realisasi 2,63 atau capaian sebesar 92,93%, berdasarkan Hasil perolehan nilai indeks SPBE berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada

Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, namun indeks 2,63 tersebut mendapatkan predikat “**baik**”. Nilai indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan Adapun Prediket Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini :

Tabel. 3.4
Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator internal instansi Pusat/Daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil perolehan nilai indeks SPBE berdasarkan SK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kota Dumai Tahun 2022 sebagai berikut :

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Riau	3,00	Baik
2	Pemerintah Kab. Kampar	2,22	Cukup
3	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2,24	Cukup
4	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	2,38	Cukup
5	Pemerintah Kab. Siak	2,34	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2,12	Cukup
7	Pemerintah Kota Pekanbaru	2,83	Baik
8	Pemerintah Kota Dumai	2,63	Baik

Berdasarkan hasil perolehan nilai tersebut diatas, masih terdapat sejumlah kelemahan yang harus segera di evaluasi dan dibenahi, seperti domain tata kelola SPBE pada perencanaan strategis SPBE Kota Dumai. Terlepas dari itu semua itu, target SPBE dapat tercapai karena dukungan Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa sub kegiatan antara lain : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

2. Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah

Target dari indikator sasaran ini yaitu sebanyak 90 Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah dengan realisasi capaian pada tahun 2022 sebanyak 111 Akses atau sebesar 123 %. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut telah tercapai bahkan melebihi target sesuai dengan yang direncanakan pada tahun 2022. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program Aplikasi Informatika.

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pad sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah ini merupakan sub kegiatan Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah

Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan dalam hal pengelolaan Peningkatan Jaringan Komunikasi dan Informasi. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Akses Internet yang dilakukan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. dengan target 90 Akses terealisasi sebanyak 111 Titik Akses sudah termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai.

Tabel 3.5
Alokasi Bandwith Internet Tahun 2022

No	UNIT / OPD	Jumlah	Ruangan		Alokasi Bw		Type
					Domestik	Internasional	
1	BAPEDA	1	1	Ruang Server		30 Mbps	Dedicated
2	BKPSDM (BKD)	2	1	Ruang Perbendaharaan		30 Mbps	Dedicated
			2	Ruang Server		30 Mbps	Dedicated
3	BPKAD	3	1	Bidang Anggaran Ruang Server Lt 1		80 Mbps	Dedicated
			2	Sekretariat Lt 1		30 Mbps	Dedicated
			3	Bidang Aset Lt 2		30 Mbps	Dedicated
4	DINAS KESEHATAN	1	1	Ruang Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
5	DPRD	6	1	Ruang Bendahara		30 Mbps	Dedicated
			2	Ruang Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
			3	Ruang fraksi 1		30 Mbps	Dedicated
			4	Ruang fraksi 2		30 Mbps	Dedicated
			5	Ruang fraksi 3		30 Mbps	Dedicated
			6	Ruang fraksi 4		30 Mbps	Dedicated
6	INSPEKTORAT	2	1	Ruang Bendahara LT 1		30 Mbps	Dedicated
			2	Ruang IRBAN LT 2		30 Mbps	Dedicated
7	SETDA	7	1	Bagian Keuangan Lt 1		30 Mbps	Dedicated
			2	Bagian Pemerintahan Lt 2		30 Mbps	Dedicated
			3	Bagian Umum Lt 2		30 Mbps	Dedicated
			4	Bagian Pembangunan Lt 3		30 Mbps	Dedicated
			5	Ruang Rapat Wako Lt 3		30 Mbps	Dedicated
			6	Aula dan Ruang SDM Lt 4		30 Mbps	Dedicated
			7	Roof top Lt 4		30 Mbps	Dedicated
8	CAMAT DUMAI TIMUR	2	1	Bendahara		30 Mbps	Dedicated
			2	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
9	DISNAKER	2	1	Ruang Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
			2	Ruang Bendahara		30 Mbps	Dedicated
10	MEDIA CENTER	1	1	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
11	PENDOPO	1	1	Meja Mixer LT2		30 Mbps	Dedicated
12	PERLINDUNGAN ANAK	1	1	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
13	GUDANG OBAT RSUD	2	1	Gudang Obat		30 Mbps	Dedicated
			2	Lab		30 Mbps	Dedicated
14	BAPPENDA	5	1	Bendahara pengeluaran (Gedung Depan)		30 Mbps	Dedicated
			2	Bendahara pemasukan 1 (Gedung Belakang)		30 Mbps	Dedicated
			3	Bendahara pemasukan 2 (Gedung Belakang)		30 Mbps	Dedicated

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) 2022

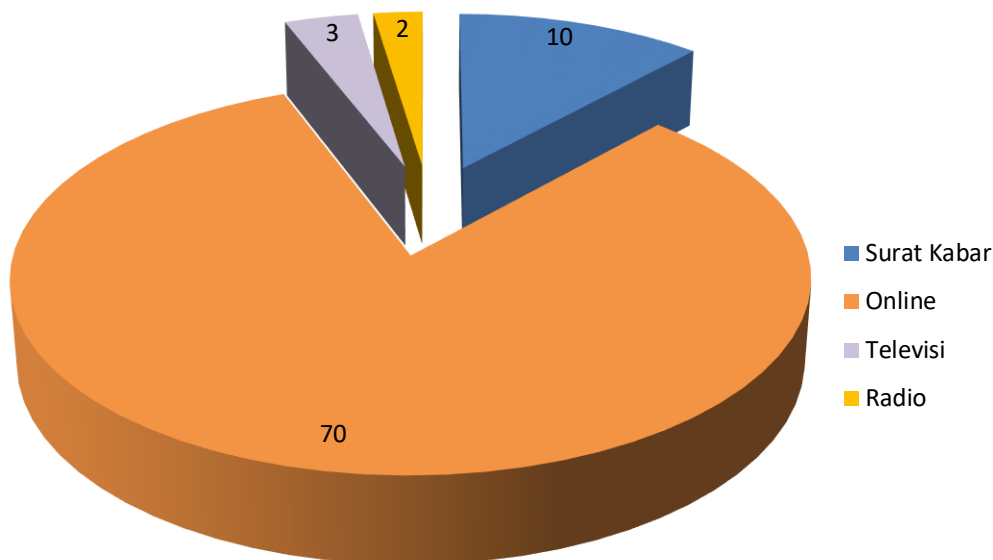
			4	Ruang Server (Gedung Depan)		30 Mbps	Dedicated
			5	Ruang PBB (Gedung Depan)		30 Mbps	Dedicated
15	BKT.GELANGGANG	2	1	Gedung Perpustakaan		30 Mbps	Dedicated
			2	Panggung (Live streaming)		30 Mbps	Dedicated
16	BPBD	1	1	Sekretariat & Keuangan		30 Mbps	Dedicated
17	BPTPM	2	1	Ruang Server		30 Mbps	Dedicated
			2	Ruang Bendahara		30 Mbps	Dedicated
18	DISKOMINFO	3	1	Ruang Sekretariat		50 Mbps	Dedicated
			2	Ruang Command Center		30 Mbps	Dedicated
			3	Ruang Bidang IKP		30 Mbps	Dedicated
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	1	Bagian Program		30 Mbps	Dedicated
			2	Bidang Kebersihan dan Taman		30 Mbps	Dedicated
20	KESBANGPOL	1	1	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
21	DINAS PARIWISATA	2	1	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
			2	UPT Bukit Gelanggang		30 Mbps	Dedicated
22	PUPR	3	1	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
			2	Bendahara		30 Mbps	Dedicated
			3	Lt 1		30 Mbps	Dedicated
23	SATPOL PP	2	1	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
			2	SIMPANG SOEBRANTAS		30 Mbps	Dedicated
24	UKM (SOEBRANTAS)	2	1	Bendahara		30 Mbps	Dedicated
			2	Ruang Belakang		30 Mbps	Dedicated
25	DAMKAR	1	1	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
26	CAMAT DUMAI BARAT	2	1	Bendahara		30 Mbps	Dedicated
			2	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
27	PERIKANAN	1	1	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
28	PERTANIAN	1	1	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
29	CAPIL	2	1	Ruang Aplikasi SIAK Kependudukan		30 Mbps	Dedicated
			2	Ruang Bendahara		70 Mbps	Dedicated
30	DINAS PENDIDIKAN	1	1	Ruang Server		30 Mbps	Dedicated
31	DINAS PERDAGANGAN	1	1	Ruang Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
32	RSUD	1	1	Sekretariat Keuangan		30 Mbps	Dedicated
33	CAMAT DUMAI KOTA	2	1	Aula		30 Mbps	Dedicated
			2	Bendahara		30 Mbps	Dedicated
34	CAMAT DUMAI SELATAN	1	1	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
35	CAMAT MEDANG KAMPAI	1	1	Ruang Kependudukan		30 Mbps	Dedicated
36	CAMAT SEI 9	1	1	Ruang Bendahara		30 Mbps	Dedicated
37	DINSOS	1	1	Ruang Sekretariat		40 Mbps	Dedicated
38	KB	1	1	Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
39	MASJID TAQWA	1	1	Sekretariat		-	-
40	DISHUB	1	1	RUANG SERVER		30 Mbps	Dedicated
41	CCTV LAMPU MERAH	5	1	SIMPANG BUNDARAN		30 Mbps	Dedicated
			3	SIMPANG BUMI AYU		30 Mbps	Dedicated
			4	SIMPANG SUKAJADI		30 Mbps	Dedicated
			5	LALIN CEMPEDAK			
42	KEC BUKIT KAPUR	1	1	Bendahara		30 Mbps	Dedicated
PUSKESMAS							
43	Puskesmas Medang Kampai	1	1	Sekretariat		50 Mbps	Dedicated
44	Puskesmas Bukit Kapur	1	1	Sekretariat		50 Mbps	Dedicated
45	Puskesmas Bumi Ayu	1	1	Sekretariat		50 Mbps	Dedicated

46	Puskesmas Dumai Kota	1	1	Sekretariat		50 Mbps	Dedicated
47	Puskesmas Dumai Barat	1	1	Sekretariat		50 Mbps	Dedicated
48	Puskesmas Jaya Mukti	1	1	Sekretariat		50 Mbps	Dedicated
49	Puskesmas Sei Sembilan	1	1	Sekretariat		50 Mbps	Dedicated
50	Puskesmas Bukit Timah	1	1	Sekretariat		50 Mbps	Dedicated
51	Puskesmas Medang Kampai	1	1	Sekretariat		50 Mbps	Dedicated
52	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1	1	Sekretariat		50 Mbps	Dedicated
	KELURAHAN						Dedicated
53	Bagan Besar	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
54	Bangsar Aceh	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
55	Bintan	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
56	Bukit Batrem	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
57	Bukit Datuk	1	1	Sekretariat		10Mbps	Dedicated
58	Bukit Kayu Kapur	1	1	Sekretariat		10Mbps	Dedicated
59	Buluh Kasap	1	1	Sekretariat		10Mbps	Dedicated
60	Bumi Ayu	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
61	Dumai Kota	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
62	Guntung	1	1	Sekretariat		-	-
63	Jaya Mukti	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
64	Mundam	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
65	Pangkalan Sesai	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
66	Simpang Tetap Darul Ichsan	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
67	Sukajadi	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
68	Tanjung Palas	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
69	Teluk Binjai	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
70	Teluk Makmur	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
71	Purnama	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
72	Ratu Sima	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
73	Rimba Sekampung	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
74	Laksamana	1	1	Sekretariat		10 Mbps	Dedicated
75	PERKIM	3	1	Ruang Sekretariat		30 Mbps	Dedicated
			2	Ruang kadis		30 Mbps	Dedicated
			3	bendahara		30 Mbps	Dedicated

3. Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang di Sampaikan Melalui Media.

Target dari indikator sasaran ini yaitu sebanyak 85% Informasi Pemerintah Daerah yang di Sampaikan Melalui Media dengan realisasi capaian pada tahun 2022 sebanyak 85% atau sesuai Target dengan persentase 100 %. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan Media Cetak dan Elektronik Tahun 2022



Sub kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah Layanan Hubungan Media yang dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2022. Adapun indikator untuk sub kegiatan ini adalah Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui media cetak, televisi, radio dan online. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian melakukan kerjasama dengan media dalam hal penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Dumai melalui Keputusan Walikota Dumai nomor 480 Tahun 2022, menunjuk sebanyak 95 (sembilan puluh lima) media cetak dan elektronik menjadi mitra dalam penyebarluasan informasi pembangunan kota Dumai.



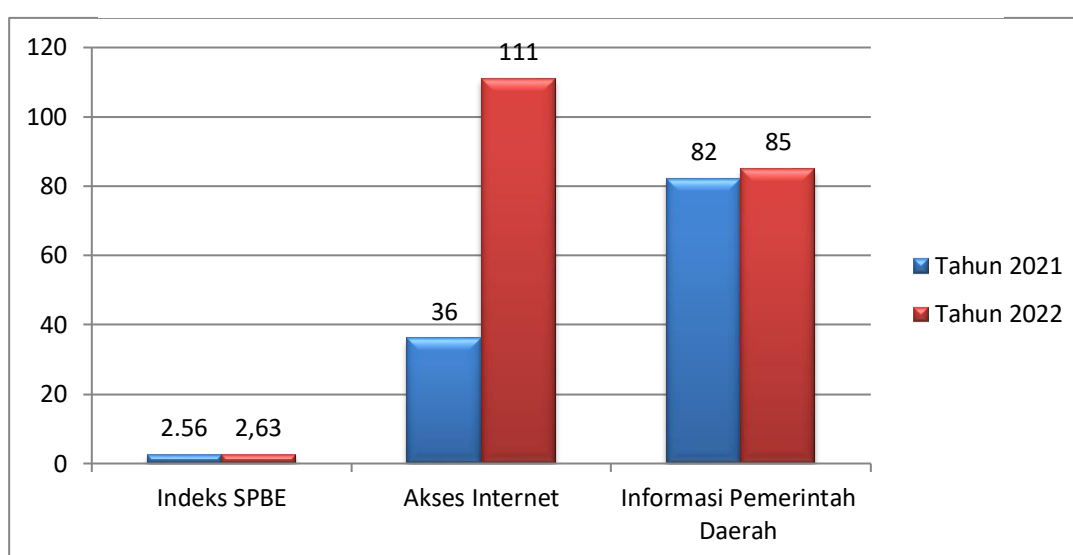
Perbandingan realisasi pencapaian indikator sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai pada tahun tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini:

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2021-2022
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai

INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022 SEMESTER II	PERBANDINGAN CAPAIAN
Indeks Layanan SPBE	Indeks 2,56	Indeks 2,63	102,73 %
Akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	36 Akses	111 Akses	308,3%
Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang di sampaikan melalui Media	82%	85%	103,65%

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Tahun 2021 dan 2022



Analisa penyebab keberhasilan dari indikator sasaran tersebut karena didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Terkait Permasalahan terhadap capaian indikator kinerja sasaran khususnya pada indikator Kategori e-government atau indeks SPBE Kota Dumai, dilihat dari penilaian mandiri yang dilakukan, terdapat sejumlah peningkatan pada kebijakan tata kelola SPBE, Kelembagaan dan teknologi informasi Komunikasi, namun masih terdapat kelemahan terkait dengan perencanaan strategis SPBE.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan perencanaan strategis SPBE, penganggaran TIK, integrasi sistem aplikasi dan aplikasi umum berbagi pakai. Kebijakan pengelolaan SPBE dapat terwujud dengan baik didukung dengan perencanaan SPBE dan serta dukungan anggaran yang memadai. perencanaan SPBE ini nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penerapan SPBE di Kota Dumai.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai pada tahun 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 11.623.386.261,-. dengan realisasi keuangan perprogram pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Keuangan Perprogram Tahun 2022

No	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.406.312.480	5.187.204.051	95,95%
2	Informasi dan Komunikasi Publik	2.434.944.752	2.430.160.983	99,80%
3	Aplikasi Informatika	3.510.551.661	3.430.660.119	97,72%
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	132.478.000	130.483.500	98,50%

5	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	139.099.368	136.376.710	98,04%
		11.623.386.261	11.314.885.363	97,34%

Adapun realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 disampaikan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada Tahun 2022, jumlah anggaran sebesar Rp.5.406.312.480,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.5.187.204.051,- atau 95,55% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.53.416.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.53.415.699,- atau 100% dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.5.979.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.5.979.500,- atau sebesar 100 %;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.4.129.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.4.129.300,- atau sebesar 100 %;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.4.555.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.4.555.500,- atau sebesar 100 %;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.4.207.400,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.4.207.400,- atau sebesar 100 %;

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.26.869.300,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.26.869.199,- atau sebesar 100%;
- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.7.674.800,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.7.674.800,- atau sebesar 100 %;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.4.073.339.681,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.884.659.526,- atau 94,51% dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.3.974.459.381,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.3.786.405.726,- atau sebesar 95,27 %;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.54.388.300,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.54.027.600,- atau sebesar 99,34%;
 - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 44.992.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 44.226.200,- atau sebesar 99.40 %;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.26.768.100,-, dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.720.900,- atau 99,82% dengan sub kegiatan :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.26.768.100,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 26.720.900,- atau sebesar 99,82%;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.151.578.000,-, dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.151.532.000,- atau 99,97% dengan sub kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.98.578.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.98.558.000,- atau sebesar 99,98 %;
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.53.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.52.974.000,- atau sebesar 99,95 %.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.351.975.399,-, dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.334.970.926,- atau 95,17% dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.9.250.400,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.9.250.400,- atau sebesar 100 %;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.66.729.400,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.49.927.096,- atau sebesar 74,82 %;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.51.548.900,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.51.471.100,- atau sebesar 99,85 %;
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.22.437.200,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.22.437.200,- atau sebesar 100 %;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.257.559.4,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.201.885.130,- atau sebesar 99,94 %;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.97.110.300,- dan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp.96.900.000,- atau 99,78% dengan sub kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 97.110.300,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 96.900.000,- atau sebesar 99,78%;

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.520.175.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.507.055.000,- atau 97,48 % dengan sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.2.925.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.2.925.000,- atau sebesar 100%;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.204.450.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.204.330.000,- atau sebesar 99,94 %;

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.312.800.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 299.800.000,- atau sebesar 95,84 %;

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah anggaran sebesar Rp.131.950.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 131.950.000,- atau 100 % dengan sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.94.520.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 94.520.000,- atau sebesar 100 %;

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.27.430.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 27.430.000,- atau sebesar 100 %;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau sebesar 100 %;

B. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pada Tahun 2022, jumlah anggaran sebesar Rp.2.434.944.752,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.430.160.983,- atau 99,80% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.434.944.752,-, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.308.613.045,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.307.036.000,- atau sebesar 99,49 %;
 - b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.414.982.380,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.414.338.710,- atau sebesar 99,84 %;
 - c. Pelayanan Informasi Publik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.51.339.300,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 50.994.700,- atau sebesar 99,23 %;
 - d. Layanan Hubungan Media
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.416.780.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.1.415.729.428,- atau sebesar 99,93 %;

- e. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.47.400.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 46.859.900,- atau sebesar 98,86%;
- f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.120.632.423,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 120.401.433,- atau sebesar 99,81 %;
- g. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 75.197.604,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.74.850.812,- atau sebesar 99,54 %

C. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Pada Tahun 2022, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.370.260.946,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.366.125.800,- atau 99,83 % melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.370.260.946,-, dengan sub kegiatan :
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab/kota.
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.9.523.250,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp 9.002.000,- atau sebesar 94,53 %;
 - b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.2.360.737.696,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.2.357.123.800,- atau sebesar 99,85 %;

2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.140.290.715-, dengan sub kegiatan :
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.217.010.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.216.630.000,- atau sebesar 99,82 %;
 - b. Sinkronisasi pengelolaarencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.224.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.223.660.800,- atau sebesar 99,85 %;
 - c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.380.705.404,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 379.797.000,- atau sebesar 99,76 %;
 - d. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.36.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.33.000.000,- atau sebesar 91,67 %;
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.16.624.910,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 16.374.600,- atau sebesar 98,49 %;
 - f. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.16.011.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 14.961.000,- atau sebesar 93,44 %;

- g. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.239.159.401,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.169.630.919,- atau sebesar 70,93 %;
- h. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.10.780.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.10.480.000,- atau sebesar 97,22 %;

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pada Tahun 2022, jumlah anggaran sebesar Rp.132.478.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.130.483.500,- atau 98,49 % melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 132.478.000,-, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.77.230.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.75.415.000,- atau sebesar 97,65 %;
 - b. Membangun Metadata Statistik Sektoral
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.55.248.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 50.068.500,- atau sebesar 99,68 %;

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pada Tahun 2022, jumlah anggaran sebesar Rp.139.099.368,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 136.376.710,- atau 98,04 % melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp.139.099.368.- dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.31.215.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.30.509.710,- atau sebesar 97,74 %;
 - b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.107.884.368,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.105.867.000,- atau sebesar 98,13 %;

C. Prestasi/Penghargaan

Selama Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai mendapatkan 2 (Dua) penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia dan Komisi Informasi Provinsi Riau yang telah diterima pada tahun 2022. Adapun penghargaan yang telah diberikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Penghargaan pada Dinas Komunikasi, Statistik
dan Persandian Kota Dumai Tahun 2022

No.	Tahun	Nama Penghargaan	Tingkat
1.	2022	Penghargaan KI Riau Award 2022 Peringkat Menuju Informatif (Kategori Pemerintahan Kabupaten/Kota)	Provinsi Riau
2.	2022	Pendampingan dan Penghargaan gerakan Menuju Smart City 2022	Nasional

Dengan adanya 2 penghargaan ini diharapkan untuk menjadi motivasi bagi Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai untuk lebih meningkatkan Kinerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan keberhasilan. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai adalah Pelayanan Publik belum seluruhnya berbasis elektronik dan terintegrasi; Terhadap kondisi tersebut, perlu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbasis elektronik dan terintegrasi.

Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai dapat berjalan dengan baik perlu mendapat alokasi anggaran yang proporsional, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

Dumai, Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI



Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700511 199101 1 001

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)